



Judul : DPR Diminta Perhatikan Suara Konstituen
Tanggal : Senin, 30 September 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

DPR Diminta Perhatikan Suara Konstituen

Para wakil rakyat periode 2024-2029 diminta konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat dan tidak membuat produk yang bertentangan dengan suara konstituen.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 diharapkan memiliki kualitas lebih bagus dibanding periode sebelumnya. Anggota Dewan yang baru harus konsisten dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Peran-peran DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan diminta sesuai dengan suara konstituen sehingga tidak menimbulkan resistensi.

Masa jabatan 575 anggota DPR akan berakhir pada Senin (30/9/2024). Selanjutnya, 580 anggota DPR terpilih hasil Pemilihan Legislatif 2024 akan dilantik pada Selasa (1/10). Anggota DPR yang akan diantik tersebut berasal dari delapan fraksi, berkarang satu fraksi, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang perolehan suaranya di Pemilu 2024 tidak mencapai ambang batas parlemen.

DPR periode 2019-2024 telah menjalankan berbagai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sejumlah undang-undang (UU) telah disahkan, begitu pula tugas mengawal anggaran di tengah masa pandemi Covid-19. Sementara dalam fungsi pengawasan, DPR mengawasi pelaksanaan ibadah haji hingga membentuk panitia khurus haji.

Dalam fungsi legislasi, tak kurang dari 130 rancangan undang-undang (RUU) telah selesai dibahas bersama pemerintah dalam kurun waktu lima tahun. Sebagian UU itu sudah

danantikan publik sejak lama, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KITA), UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta UU Aparatur Sipil Negara.

Produk-produk legislasi yang sesuai aspirasi rakyat itu berdampak pada citra positif DPR. Salah satunya, survei pada Juni 2024 yang menempatkan citra positif DPR mencapai 62,6 persen atau meningkat 12,1 persen dibandingkan survei Desember 2023 (50,3 persen).

Citra positif tersebut tertinggi selama DPR periode 2019-2024. Dilihat secara kontekstual, respons positif iri erat kaitannya dengan pembahasan RUU KITA yang akhirnya disahkan pada Selasa (4/6). Regulasi ini dinilai meningkatkan perhatian negara kepada kesejahteraan ibu dan anak sehingga mendorong citra DPR sebagai salah satu pembentuk UU.

Namun, tak jarang, produk legislasi DPR bersama pemerintah tidak sejalan dengan keinginan publik. Pembahasan sejumlah RUU, antara lain RUU Cipta Kerja dan RUU Mahkamah Konstitusi, menuai unjuk rasa. Bahkan, DPR sempat membatalkan pengesahan RUU Pilkada karena muncul gelombang unjuk rasa di daerah-daerah.

Tak konsisten

Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi menilai, fungsi legislasi dan pengawasan DPR periode 2019-2024 cenderung lemah. DPR tidak konsisten untuk terus menyuarakan kepentingan rakyat. Beberapa produk legislasi bahkan tidak selaras dengan aspirasi masyarakat sehingga menimbulkan resistensi publik.

IPC mencatat, hanya separuh aspirasi dari rakyat yang diserap oleh DPR. Rinciannya, aspirasi dari masyarakat sipil yang diserap yakni 256 aspirasi dari 576 keseluruhan aspirasi. Sementara itu, kalangan akademisi hanya 99 aspirasi yang diserap dari total 209 aspirasi. Adapun hampir semua aspirasi dari pengusaha justru diserap, yakni 300 dari 309 aspirasi.

"Ini menunjukkan DPR tidak konsisten membawa aspirasi masyarakat dan lebih mengakomodasi kepentingan kelompok bisnis dan pemerintah," kata Ahmad Hanafi.

Di sisi lain, fungsi pengawasan DPR justru sangat lemah. Selama lima tahun, DPR tidak mampu membangun keseimbangan sebagai pihak yang mestinya mengoreksi kebijakan pemerintah. DPR justru sering mengikuti keputusan pemerintah dan cen-

derung menjadi "stempel" kebijakan yang diusulkan pemerintah.

Hak-hak DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan juga tidak dioptimalkan. Dalam periode ini, DPR hanya sekali membentuk pansus, yakni Pansus Haji. Padahal, banyak masalah yang mestinya bisa diawasi oleh DPR, seperti Tragedi Kanjuruhan, kebocoran data pribadi, dan judi daring yang bisa dibawa ke dalam pansus hingga menggunakan hak untuk menyatakan pendapat.

Adepun dalam fungsi anggaran, DPR mestinya mempertanyakan kebutuhan anggaran besar di kementerian/lembaga yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

Hanafi pun berharap DPR periode 2024-2029 konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat dan tidak membuat produk yang bertentangan dengan suara konstituen.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyarto menilai, DPR periode 2019-2024 telah optimal menjalankan fungsi legislasi. Berbagai produk UU telah memberikan kepastian hukum kepada pemerintah untuk memperlancar agenda eksekutif.



Namun, dalam pembahasan produk UU ini terkadang menimbulkan kontroversi dan ditolak publik. Publik yang tidak sepakat pun dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Meskipun demikian, DPR juga menjalankan peran menyeras aspirasi rakyat dengan membentuk UU yang dibutuhkan publik. Sejumlah RUU yang sudah sangat lama pembahasannya, seperti UU KIA, TPKS dan PDP, bisa disahkan DPR periode sekarang.

"Setiap pengesahan undang-undang kemungkinan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan sehingga dapat berdampak pada citra DPR yang naik-turun," ujar Wihadi saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (29/9).

Menurut dia, DPR periode 2019-2024 mampu menciptakan *role model* atau panutan dalam memberikan dukungan produk legislasi kepada pemerintah. Dulu, mayoritas fraksi di DPR itu membuat program-program pemerintah menjadi lebih efektif.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdulkh mengatakan, peran Banggar DPR sangat vital dalam mengawal politik anggaran untuk masyarakat. Sebab, berbagai anggaran pembangunan akan dibahas bersama-sama antara DPR dan pemerintah.

Namun, ada keterbatasan dari sisi kewenangan DPR untuk mengawasi anggaran negara. Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 telah membatasi kewenangan DPR dalam membahas Rancangan APBN hanya sampai pada tingkat program.

Parahal, sering kali permasalahan penggunaan anggaran berada di satuan tiga ke bawah. Banggar meremakan *missing link* antara tujuan strategis dan rencana besar dengan pelaksanaan anggaran dan program teknis.

"Perlu diatur jalan baru agar pengawasan dalam menjalankan fungsi anggaran bisa lebih efektif tanpa menabrak putusan MK," tutur Said.

Di sisi lain, ia berharap anggota Banggar DPR periode mendatang diisi oleh anggota-anggota yang memiliki pemahaman tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan sistem akuntansi negara.

Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, C. Ram Ahmad Syamsurijal menambahkan, DPR periode 2019-2024 menghadapi tantangan besar dalam menjalankan fungsi anggaran. Sebab pada medio 2019 hingga 2021, Indonesia dilanda pandemi Covid-19. (BY)